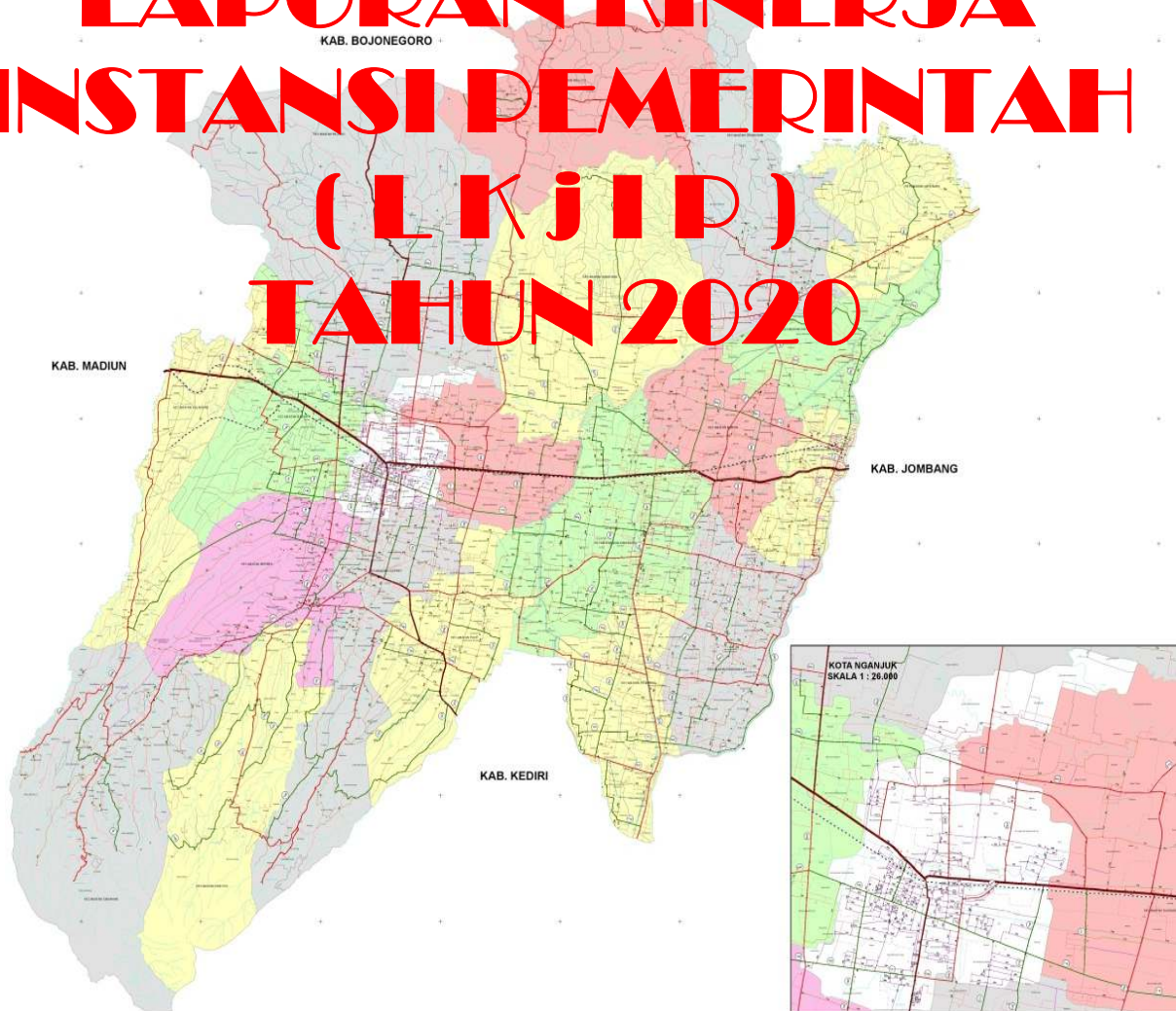




LAPORAN KINERJA KAB. BOJONEGORO INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020



**BAPPEDA KABUPATEN
NGANJUK**

Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 1, Telp. (0358) 321233

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya dapat tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, dengan harapan dapat terus melaksanakan segala tanggungjawab sesuai bidang tugas pokok Bappeda Kabupaten Nganjuk.

LKjIP merupakan laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan substansi format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 merupakan penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Nganjuk tahun kedua untuk pencapaian sasaran strategis pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Semoga penyajian LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 menjadi umpan balik untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek pemahaman, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun kondisi pelaksanaannya.

Nganjuk, Pebruari 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN NGANJUK

Drs. ADAM MUHARTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730511 199311 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Umum	1
1.2.	Gambaran Umum Organisasi	1
1.3.	Tugas, Pokok dan Struktur Organisasi	2
1.4.	Permasalahan Utama	2
1.5.	Landasan Hukum	3
1.6.	Sistematika Penyajian	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	5
2.1.	Rencana Strategis	5
	2.1.1 Visi dan Misi	5
	2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	5
2.2.	Rencana Kinerja Tahunan	6
2.3.	Perjanjian Kinerja	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	11
	3.1.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020	11
	3.1.2 Perbandingan realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya	12
	3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	12
	3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	12
3.2.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Pemecahan Masalah	12
3.3	Akuntabilitas Keuangan	18
	3.3.1 Realisasi Anggaran	18
	3.3.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	20
	3.3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
	3.3.4 Realisasi Anggaran Program, Evaluasi dan Rekomendasi	21
BAB IV	PENUTUP	30
LAMPIRAN		
1.	Matrik Renstra	
2.	IKU	
3.	Perjanjian Kinerja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Permasalahan utama yang sedang dihadapi sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 antara lain : masih rendahnya produk perencanaan yang implementatif ; belum optimalnya pemanfaatan teknologi data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; menurunnya partisipasi masyarakat di berbagai forum yang diselenggarakan ; tuntutan terhadap kualitas dan profesionalisme SDM perencana ; lemahnya pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah; pelaksanaan asisitensi terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan LKjIP agar tercipta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi lebih baik.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun mendatang, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain : Meningkatkan koordinasi dengan fokus pada kesetaraan, kebersamaan antar bidang, antar SKPD; Meningkatkan kualitas perencanaan agar akuntabilitas kinerja dapat terwujud dengan menerapkan sistem perencanaan yang terintegrasi berbasis web; Meningkatkan volume monitoring yang diatur secara berkala untuk dijadikan bahan evaluasi.

Bab I

Pendahuluan

1.1. Umum

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik agar terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Institusi Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang membantu Kepala Daerah menjalankan tugas dan fungsi unsur penunjang urusan pemerintah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan menyusun LKjIP Tahun 2020 sebagai Laporan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020, dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Bappeda untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk di tahun selanjutnya.

1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nganjuk

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, badan sebagaimana Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya secara operasional kewenangan suatu Badan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016, sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016. Sesuai dengan kewenangannya Bappeda Kabupaten Nganjuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, Fungsi Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

2. Fungsi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan; penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi :

Untuk menjalankan tugas fungsi tersebut, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa pimpinan terdiri dari 1 (satu) Eselon II sebagai Kepala Bappeda, 1 (satu) Eselon III/a sebagai Sekretaris, 5 (Lima) Eselon III/B Kepala Bidang, 6 (enam) Eselon IV/a sebagai Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, selengkapnyanya terdapat pada Lampiran 1, dan ditambah unsur staf sebanyak 18 orang.

1.4. Permasalahan Utama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu sebagai berikut :

- 1) Belum sinkronnya pelaksanaan mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui musrenbang dengan pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh pihak legislatif;
- 2) Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penentuan target dan capaian kinerja program dengan sasaran belum optimal,
- 3) Proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik belum terintegrasi.
- 4) Masih kurangnya kapasitas SDM perencana perangkat daerah.
- 5) Kurangnya tenaga fungsional peneliti pada bidang penelitian dan pengembangan yang berdampak pada ketergantungan penyelenggaraan penelitian pengembangan dengan lembaga pemerintah lainnya;

6) Terdapat kekosongan pejabat eselon III dan IV pada perangkat daerah.

1.5. Landasan hukum

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
- 6). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- 8). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005–2025 ;
- 9). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 10). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;
- 11). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
- 12). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
- 13). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Tentang Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 14). Peraturan Bupati Nganjuk, Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

1.1. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Permasalahan Utama, Landasan Hukum, dan Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif pemecahan masalah, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Bab II

Perencanaan Kinerja.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Bupati.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat” Slogan (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)**. Misi untuk mewujudkan Visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;
- 2) Meningkatkan kinerja Birokrasi bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan ;
- 3) Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ;
- 4) Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal ;
- 5) Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya yang didukung pengembangan kebanggaan terhadap kesenian dan kebudayaan berbasis kearifan lokal serta teknologi tepat guna ;
- 6) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang memiliki fungsi dalam bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki peran dalam pencapaian misi ke-2 RPJMD 2018-2023, yaitu **“Meningkatkan kinerja Birokrasi bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”**. Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun, sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Nganjuk 2018-2023 melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun, sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Nganjuk 2018-2023 melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Untuk memberikan arah bagi tercapainya tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023) yang meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018-2023. Program yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran serta kebijakan strategis, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 :			
Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan dinamis			
Sasaran 1 :			
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis	1) % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD 2) % Capaian sasaran Pembangunan daerah \geq 80 % 3) % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	1) Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; 2) Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat; 3) Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan Pembangunan.	1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah ; 2) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah ; 3) Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah ; 4) Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat; 5) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat; 6) Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Ekonomi; 7) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan.
Tujuan 2 :			
Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang inovatif			
Sasaran 2 :			
Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif	% pemanfaatan hasil kelitbangan	Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	1) Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah 2) Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah

2.2. Rencana Kinerja Tahunan.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk ditetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai setiap tahun serta program kegiatan beserta anggaran. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja dengan tujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah ; sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 berisi seperti pada tabel berikut :

Tabe 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020	Program	Kegiatan	
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis	1) % kesesuaian muatan antara RKPD dengan RPJMD.	100	1) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	7 Kegiatan	
		Jumlah				7 Kegiatan
		2) % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq 80\%$	100	1) Pelayanan Administrasi Perkantoran ;	10 kegiatan	
				2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	6 kegiatan	
				4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 kegiatan	
				5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1 Kegiatan	
				6) Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Kegiatan	
				7) Perencanaan Bidang Sosial	4 kegiatan	
				8) Perencanaan Bidang Ekonomi	3 kegiatan	
				9) Peningkatan Bidang Infrastruktur	2 kegiatan	
Jumlah				31 kegiatan		
3) % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	Perencanaan Pengembangan Wilayah	2 kegiatan			
Jumlah				2 kegiatan		
Jumlah kegiatan Sasaran 1					40 kegiatan	
2.	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif	% pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	Program Penelitian dan Pengembangan	8 Kegiatan	
Jumlah kegiatan Sasaran 2					8 Kegiatan	
Jumlah kegiatan seluruh sasaran 1 dan 2					48 Kegiatan	

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2020 serta alokasi anggaran, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2020

Program	Kegiatan	Anggaran
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Penyediaan Jasa surat menyurat ;	4.500.000,-
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;	162.200.000
	3) Penyediaan Alat Tulis Kantor ;	23.577.000
	4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;	27.820.000
	5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;	3.000.000,-
	6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;	6.000.000,-
	7) Penyediaan makanan dan minuman ;	58.194.000,-
	8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ;	163.500.000,-

	9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan ;	14.900.000,-
	10) Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah.	7.300.000,-
	Jumlah program 1	470.991.000,-
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.000.000,-
	2) Pengadaan Mebeleur	50.000.000,-
	3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	170.000.000,-
	4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	233.122.500,-
	5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	21.440.400,-
	6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	33.000.000,-
	Jumlah program 2	527.562.900,-
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	97.100.000,-
	Jumlah Program 3	97.100.000,-
4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ;	25.000.000,-
	2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran ;	2.500.000,-
	3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;	2.500.000,-
	Jumlah program 4	30.000.000,-
5) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1) Pengembangan Planning Center (Pusat database dan informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik) ;	35.620.000,-
	2) Penyusunan LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2019 ;	126.730.000,-
	3) Pengelolaan SIPD ;	36.069.000,-
	4) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ;	410.793.505,-
	5) Penyusunan KUA dan PPAS ;	729.155.000,-
	6) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;	39.988.000,-
	7) Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan.	33.300.000,-
	Jumlah program 5	1.411.655.505,-
6) Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	1) Pagu Indkatif Kewilayahan ;	4.979.000,-
	2) Evaluasi Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan ;	23.107.000,-
	Jumlah program 6	28.086.000,-
7) Program Perencanaan Bidang Sosial	1) Koordinasi dan fasilitasi program kabupaten Sehat ;	81.305.700,-
	2) Koordinasi dan fasilitasi kegiatan bina lingkungan / tanggungjawab sosial bagi perusahaan (corporate social responsibility / CSR) ;	19.083.000,-
	3) Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);	114.568.000,-
	4) Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	127.625.500,-
	Jumlah program 7	342.582.200,-
8) Program Perencanaan Bidang Ekonomi	1) Pendamping Program Anti Kemiskinan (APP) ;	88.336.500,-
	2) Koordinasi Perencanaan Kegiatan Perekonomian ;	62.994.900,-
	3) Pendampingan Kawasan Agropolitan;	35.256.800,-
	Jumlah program 8	186.588.200,-
9) Program Peningkatan Bidang Infrastruktur	1) Perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang perumahan , kawasan permukiman dan pertanian;	71.600.000,-

	2) Perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum.	558.069.900,-
	Jumlah program 9	629.669.900,-
10) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	1) Koordinasi dan fasilitasi perencanaan kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan) ;	183.157.150,-
	2) Perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang tata ruang.	250.000.000,-
	Jumlah program 10	433.157.150,-
11) Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan Daerah	1) Penyusunan Perencanaan Lanjutan Studi Kelayakan Bendungan Margopatut Kec. Sawahan (DED);	3.371.654.100,-
	2) Fasilitasi Pembangunan Bendungan Semantok dan Bendungan Margopatut Kabupaten Nganjuk ;	2.812.585.000,-
	3) Fasilitasi Perijinan Pembangunan di Lahan Kawasan Hutan ;	566.363.000,-
	4) Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Nganjuk;	472.547.300,-
	5) Penelitian Peningkatan Pendapatan Petani dengan penerapan sistem pertanian terpadu (lanjutan) ;	150.000.000,-
	6) Studi Kelayakan Pembangunan tempat pengolahan limbah B3 di kabupaten Nganjuk;	300.000.000,-
	7) Studi Penutupan lahan hutan di Kabupaten Nganjuk;	200.000.000,-
	8) Koordinasi dengan Lembaga LITBANG dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan.	19.577.600,-
	Jumlah program 11	7.892.727.000,-
	Jumlah keseluruhan program	12.050.119.855,-

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target-target setiap indikator sasaran pada penetapan kinerja diperjanjikan tahun 2020, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis	% Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.	100 %
		% Capaian sasaran Pembangunan daerah \geq 80 %	100 %
		% Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100 %
2.1	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif	% pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %

	Program		Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	470.991.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	527.562.900,-
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	30.000.000,-
4.	Pengembangan Data/Informasi	Rp.	335.000.000,-
5.	Kerjasama Pembangunan	Rp.	76.500.000,-
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	97.100.000,-
7.	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	1.411.655.505,-
8.	Perencanaan Bidang Pemerintahan	Rp.	28.086.000,-
9.	Perencanaan Sosial	Rp.	342.582.200,-
10.	Perencanaan Bidang Ekonomi	Rp.	186.588.200,-
11.	Perencanaan Bidang Infrastruktur	Rp.	629.669.900,-
12.	Perencanaan Pengembangan Wilayah	Rp.	433.157.150,-
13.	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	7.892.727.000,-
		Rp.	12.050.119.855,-

Bab III

Akuntabilitas kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Bappeda Kabupaten Nganjuk sesuai target kinerja dan alokasi anggaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pengukuran ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut :

3.1.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Nganjuk telah menetapkan 4 (empat) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2020, untuk selanjutnya akan dilakukannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2020 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis	1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
	2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah ≥ 80 %	100 %	83,33	83,33	Tinggi
	3. % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian Sasaran I			94,44%	Sangat Tinggi
2. Terwujudnya	% pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	67	67%	

penelitian dan pengembangan yang implementatif	Rata-rata capaian Sasaran II	67	67%	rendah
--	------------------------------	----	-----	--------

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya.

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, berikutnya perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dengan Tahun 2019 untuk mengetahui perkembangan realisasi kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis	1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.	100 %	92,97%	100%
	2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah \geq 80 %	100 %	94,44%	83,33%
	3. % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100 %	100%	100%
	Rata-rata capaian sasaran 1	100 %	95,80%	94,44%
Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan	4. % rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 %	94,44%	67%
	Rata-rata capaian sasaran 2	100 %	94,44%	67%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode Renstra

Realisasi kinerja Tahun 2020 adalah pelaksanaan kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2018-2023. Realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan Konsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran Dalam Perencanaan Pembangunan	1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.	100 %	100%	100%
	2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah \geq 80 %	100 %	77,78%	83,33%
	3. % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100 %	100%	100%
2. Meningkatkan efektifitas penelitian dan pengembangan	% rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	100%	67%	67%

Perbandingan realisasi kinerja Sasaran Strategis 1 sampai dengan akhir periode Renstra, sebesar 100 % karena target yang ditetapkan bersifat pengulangan (non kumulatif).

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

Dalam hal melaksanakan tugas fungsi tidak ada ukuran Standar nasional yang ditetapkan untuk Bappeda Kabupaten Nganjuk.

3.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif pemecahan masalah.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu dengan membandingkan dengan target dan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja. Pada Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :



Sasaran diatas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terhadap program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan hasil capaian sasaran strategis I tahun 2020 dihitung rata-rata sebesar 94,44%. Hal ini diketahui melalui beberapa indikator untuk mengukur capaian sasaran strategis I dengan penjelasan sebagai berikut :

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	% Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.	100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD ditetapkan dalam rangka untuk mengetahui keselarasan selama proses perencanaan pembangunan daerah.

1. Muatan RPJMD dengan RKPD;

Kesesuaian muatan antara RKPD dengan RPJMD adalah untuk menganalisis kesesuaian muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek program dan indikator program, dengan cara menjumlahkan muatan RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah muatan RPJMD.

Muatan	RPJMD	RKPD	%
Program	149	149	100%
Indikator Program	149	149	100%
Rata-rata			100%

Kegiatan asistensi yang dilakukan dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2020 terhadap penyesuaian program yang ada dalam dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dihasilkan 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Hasil capaian tersebut dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pengelolaan SIPD
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
- 3) Penyusunan KUA dan PPAS
- 4) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Muatan antara Renja SKPD dengan RKPD ;

Kesesuaian muatan antara Renja SKPD dengan RKPD adalah untuk menganalisis kesesuaian muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek program dan kegiatan, dengan cara menjumlahkan muatan Renja SKPD dibagi jumlah muatan RKPD.

Muatan	Renja	RKPD	%
Program	149	149	100
Kegiatan	1.495	1.945	100
Rata-rata			100

Kegiatan asistensi yang dilakukan terhadap penyesuaian program yang ada dalam dokumen Renja OPD dengan dokumen RKPD dihasilkan 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Hasil capaian tersebut dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan ;
- 2) Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- 3) Koordinasi Perencanaan Kegiatan Perekonomian ;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi perencanaan kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan) ;

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase Capaian sasaran Pembangunan daerah ≥ 80 %	100 %	83,33%	83,33%

Indikator kinerja Persentase Capaian sasaran Pembangunan daerah ≥ 80 % adalah untuk menganalisis realisasi sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Atau rata-rata/capaian ≤ 80

% interval nilai realisasi kinerja, dengan menjumlahkan sasaran yang mencapai target dibagi jumlah seluruh sasaran yang ada di RPJMD.

Pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebanyak 18 sasaran strategis, dan capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Sasaran. Hasil capaian indikator kinerja sasaran tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- Jumlah Sasaran dalam RPJMD : 18 Sasaran
- Jumlah sasaran yang tercapai : 15 Sasaran
- Jumlah sasaran yang kurang tercapai : -
- Jumlah sasaran tidak tercapai : 3 Sasaran
- % capaian kinerja sasaran Tahun 2020 : 83,33%

Adapun capaian sasaran untuk masing-masing Misi pemerintahan adalah sebagai berikut

:

Kode	Sasaran Strategis	Tercapai	Kurang Tercapai	Tidak Tercapai
Misi 1 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.				
1.1.1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	√	-	-
Misi 2 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.				
2.1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	√	-	-
2.1.2	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	√	-	-
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.				
3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	√	-	-
3.1.2	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	√	-	-
3.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	√	-	-
3.1.4	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
Misi 4 : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain				
4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	√	-	-
4.1.2	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	-	-	√
4.1.3	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	-	-	√
4.1.4	Meningkatnya Iklim investasi	√	-	-
4.1.5	Meningkatnya kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	√	-	-
Misi 5 : Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.				
5.1.1	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	-	-	√
5.1.2	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.	√	-	-

Misi 6 : Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian.				
6.1.1	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal	√	-	-
6.1.2	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	√	-	-
6.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	√	-	-
6.1.4	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	√	-	-

Secara formulasi jika dihitung seluruh jumlah sasaran dalam RPJMD dengan jumlah sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan data yang diketahui maka pencapaian Indikator Persentase Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq 80\%$ adalah sebesar 94,44%, dengan demikian sasaran pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat dikategorikan **kurang tercapai**.

Perlu dijelaskan permasalahan capaian kinerja sasaran tidak tercapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan
2. Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
3. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah

Ketiga sasaran pembangunan yang tidak tercapai di atas terkait dengan sasaran pembangunan sosial dan ekonomi. Indikator-indikator makro ekonomi dan sosial pada Tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	% Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	100 %	100%	100%

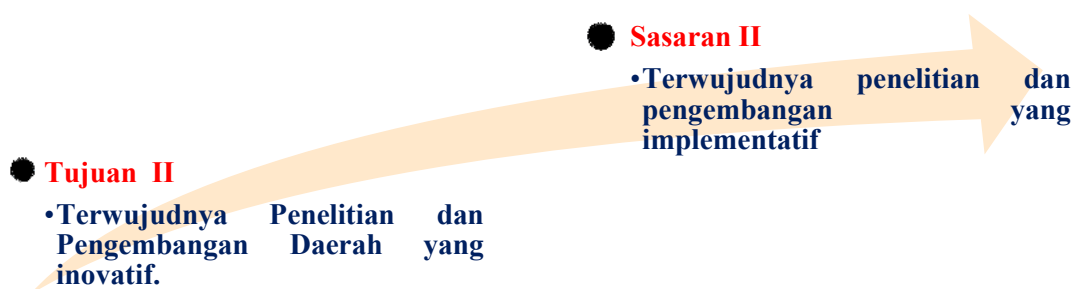
Sebagaimana tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 dalam kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW diperlukan indikator diatas untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan program antara program rencana struktur ruang dan pola ruang dengan program yang tercantum dalam RKPD. Setelah dilakukan penghitungan dan analisis data terhadap kesesuaian program maka tingkat capaian pada indikator % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW, diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Program dalam RKPD	2.482
Program yang sesuai dengan Pola Ruang & Struktur Ruang	2.482
% Capaian	100%

Dihitung rata rata tiga indikator tersebut diatas maka capaian kinerja Sasaran I yaitu “Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis” sebesar 100% %, sesuai dengan interval nilai realisasi kinerja dikategorikan **tercapai**. Hal ini telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja Sasaran I yaitu :

Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial dan Budaya, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Ketersediaan sarana prasana yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah yang dilayani (Ruang Planning Center);
- 2) Peningkatan kapasitas mempercepat koneksi internet untuk mendukung aplikasi perencanaan pembangunan berbasis web;
- 3) Pendampingan/Asistensi dalam menyusun program dan kegiatan melalui koordinasi
- 4) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi melalui laporan setiap tribulan
- 5) Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kabupaten ;
- 6) Penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan KUA-PPAS ;
- 7) Perencanaan dan Penganggaran Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) ;
- 8) Tahapan legalisasi dokumen RTRW ;



	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	% pemanfaatan hasil kelitbangan.	100 %	67%	67%

Sasaran strategis ke 2 (dua) diatas, yaitu “**Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif**” diukur dengan Indikator Kinerja “**% pemanfaatan hasil kelitbangan**”, indikator ini untuk mengukur kualitas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan harapan rekomendasi hasil penelitian dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait untuk tahun berikutnya. Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan salah satu urusan yang menjadi tugas pokok fungsi Bappeda Kabupaten Nganjuk.

Indikator sasaran kinerja “**Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif**” menghasilkan nilai capaian 50 %. Berdasarkan skala ordinal predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori sangat rendah “**tidak tercapai**”. Diukur dari hasil capaian inerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Jumlah dokumen hasil kajian yang dilaksanakan : 6 dokumen
- Jumlah dokumen yang dimanfaatkan : 2 dokumen
- % target capain kinerja : 100%
- % Hasil Capaian indikator kinerja : 67 %

6 (enam) kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Lanjutan Studi Kelayakan Bendungan Margopatut Kec. Sawahan (DED);
2. Fasilitasi Pembangunan Bendungan Semantok dan Bendungan Margopatut Kabupaten Nganjuk ;
3. Fasilitasi Perijinan Pembangunan di Lahan Kawasan Hutan;
4. Penelitian Peningkatan Pendapatan Petani dengan penerapan sistem pertanian terpadu (lanjutan);
5. Studi Kelayakan Pembangunan tempat pengolahan limbah B3 di kabupaten Nganjuk;
6. Studi Penutupan lahan hutan di Kabupaten Nganjuk.

Dari target 6 (enam) kegiatan litbang yang seharusnya ditindaklanjuti pemanfaatannya ada 2 (dua) kegiatan kajian kelitbang di tahun 2020 yang tidak terealisasi karena terdapat permasalahan, yaitu kegiatan :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan lanjutan studi kelayakan bendungan Margopatut Kec. Sawahan (DED tidak terealisasi, hal ini disebabkan karena adanya permasalahan pada proses pengadaan yaitu dengan matinyanya SKA tenaga ahli, sehingga PPKom memutuskan untuk menawarkan pembaharuan kontrak kepada rekanan, dengan jangka waktu 100 hari Namun rekanan tidak sanggup melaksanakan sehingga kontrak dibatalkan.
2. Studi kelayakan pembangunan tempat pengolahan limbah B3 di Kabupaten Nganjuk tidak terealisasi hal ini disebabkan karena hasil evaluasi PAPBD Provinsi Jawa Timur penanganan limbah B3 menjadi kewenangan tingkat Provinsi.

Untuk itu upaya pemecahan masalah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan dokumen hasil kajian yang teralisasi untuk bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah

3.3. Akuntabilitas keuangan.

3.3.1 Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020, tertuang dalam 11 program , 49 kegiatan berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2020 dengan pagu anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2020

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja tidak Langsung	5.457.989.111,-	3.494.891.189,-	64,03%
Belanja Langsung	12.050.119.855,-	6.883.728.199,-	57,13%
Jumlah	17.508.108.966,-	10.378,619.388,-	59,28%

Dilihat dari tabel diatas bahwa penyerapan anggaran cukup rendah hal ini dapat dijelaskan per belanja sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) :

Turunnya jumlah pegawai/aparatur perencana pada tahun 2020 baik yang pensiun maupun kekosongan jabatan yang tidak segera terisi, hal ini mempengaruhi penyerapan anggaran yang telah disediakan sehingga menjadi sisa anggaran pada belanja tidak langsung.

- Belanja langsung :

Di uraikan pada tabel 3.6.4.1 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan, Evaluasi dan Rekomendasi

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran pada Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel : 3.6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran	% Capaian
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis	1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD	1.411.655.505	1.335.637.545	94,61%
		2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah \geq 80 %.	1.844.812.655	1.686.629.088	91,43%
		3. % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	433.157.150	350.991.543	81,03%
Jumlah Sasaran I			4.157.392.855	3.612.303.308	86,89 %
2.	Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan	% pemanfaatan hasil kelitbangan	7.892.727.000,-	3.271.424.891,-	41,45%
Jumlah Sasaran II			7.892.727.000,-	3.271.424.891,-	41,45%
Jumlah Sasaran I dan II			12.050.119.855,-	6.883.728.199,-	57,13%

Sasaran/	Indikator	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran I								
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis	1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD	100 %	100 %		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.411.655.505	1.335.637.545	94,61 %
	2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah ≥ 80 %.	100 %	100 %		1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5) Program Perencanaan Bidang Pemerintahan; 6) Program Perencanaan Bidang Sosial; 7) Program Perencanaan Bidang Ekonomi; 8) Perencanaan Bidang Infrastruktur.	1.844.812.655	1.686.629.088	91,43 %
	3. % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	100 %	100 %	100 %	Perencanaan Pengembangan Wilayah	433.157.150	350.991.543	81,03 %
	Rata-rata capain kinerja sasaran 1	100 %	100 %		Rata-rata capain kinerja program/sasaran	4.157.392.855	3.612.303.308	86,89 %
Sasaran 2								
Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan	% pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	67 %	67 %	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan Daerah	7.892.727.000	3.271.424.891	41,45 %
	Rata-rata capain kinerja sasaran 2	100 %	67%	67%	Rata-rata capain kinerja program/sasaran	7.892.727.000	3.271.424.891	41,45 %

3.3.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Penyajian data pencapaian kinerja dan anggaran adalah untuk membandingkan antara hasil persentase fisik kegiatan dengan anggaran program kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

3.6.3 Tabel : 3.6.2.1
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020

3.3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyajian data efisiensi penggunaan sumber daya adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dengan membandingkan antara hasil persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran, sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.6.3.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis	1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD	100%	94,61	5,39 %
		2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah ≥ 80 %.	77,78	91,43	-13,65 %
		3. % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	100	81,03	18,97 %
	Rata-rata efisiensi sasaran kinerja I		277,78	267,07	3,57 %
3	Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan	% pemanfaatan hasil kelitbangan	41,45 %	67 %	25,55 %
	Rata-rata efisiensi sasaran kinerja II		41,45 %	67 %	25,55%

3.3.4 Realisasi Anggaran Program, Evaluasi dan Rekomendasi

Capaian program yang dilaksanakan diukur dengan kinerja kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Nilai capaian target kinerja program diperoleh dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatan yang mendukung program yang bersangkutan.
- b. Nilai capaian target kinerja kegiatan yang diperoleh dari rata-rata penjumlahan nilai input dan, output kegiatan bersangkutan.

Adapun perhitungan secara rinci mengenai capaian target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

TABEL : 3.6.4.1
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020, EVALUASI DAN REKOMENDASI
BAPPEDA KABUPATEN NGANJUK

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja				Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)	Indikator Program/Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
4.03.4.03.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	470.991.000	386.871.331	84.119.669	82,14	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah = (Jumlah responden yang puas/seluruh responden) "sangat baik" (nilai interval konversi IKM 100-81,26) kategori A ;	A	B	B	<p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak tercapainya target kinerja program karena ada penyerapan anggaran kurang dari 50 % yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah seiring dengan kondisi pandemi covid-19 maka kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. - Belum memadainya sarana dan prasarana jaringan internet guna mendukung adaptasi kebiasaan baru dalam pelayanan penyusunan perencanaan pembangunan (SIPD) <p>Pemecahan Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara keseluruhan hasil fisik/output kegiatan dapat diselesaikan 100 % walaupun penyerapan anggaran tidak maksimal. - Mengoptimalkan bandwidth internet dengan pemakaian secara bergiliran dan terjadwal
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	4.500.000	1.492.000	3.008.000	33,16	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah jasa surat menyurat yang direncanakan Hasil : Jumlah jasa surat menyurat yang terlayani	4.500.000 1.500	1.492.000 750	Rupiah Surat/paket %	Disesuaikan dengan kebutuhan, karena pelaksanaan pada saat pandemi COVID-19.
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	162.200.000	139.505.445	22.694.555	86,01	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah jasa layanan Hasil : Jumlah jasa yang terlayani	162.200.000 3	139.505.445 3	Rupiah Jenis %	
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.577.000	20.559.200	3.017.800	87,20	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah jenis kebutuhan ATK Hasil : Jumlah jenis kebutuhan ATK yang tercukupi	23.577.000 57	20.559.200 57	Rupiah Jenis %	
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.820.000	22.247.465	5.572.535	79,97	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah barang yang dicetak dan digandakan Hasil : Terwujudnya kelancaran kerja	27.820.000 100.000	22.247.465 98.328	Rupiah Lembar %	
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	3.000.000	2.708.000	292.000	90,27	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah Komponen Listrik yang dibutuhkan	3.000.000 11	2.708.000 11	Rupiah Macam	

						Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik	100	100	%	
4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.620.000	1.380.000	77,00	Masukan : Jumlah Dana	6.000.000	4.620.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah jenis bahan bacaan	4	4	Jenis	
						Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	100	100	%	
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	58.194.000	43.413.650	14.780.350	74,60	Masukan : Jumlah Dana	58.194.000	43.413.650	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah makan dan minum yang tersedia	1.762	1.011	Orang	
						Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman karyawan dan rapat koordinasi	100	100	%	
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	163.500.000	138.596.871	24.903.129	84,77	Masukan : Jumlah Dana	163.500.000	138.596.871	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang akan dilaksanakan	469	455	Kali	
						Hasil : Terwujudnya kelancaran rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	100	%	
4.03.4.03.01.01.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14.900.000	10.525.000	4.375.000	70,64	Masukan : Jumlah Dana	14.900.000	10.525.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah laporan evaluasi yang disusun	4	4	Laporan	
						Hasil : Jumlah laporan evaluasi ditindak lanjuti	100	100	%	
4.03.4.03.01.01.26	Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah	7.300.000	3.203.700	4.096.300	43,89	Masukan : Jumlah Dana	7.300.000	3.203.700	Rupiah	Disesuaikan dengan kebutuhan, karena pelaksanaan pada saat pandemi COVID-19
						Keluaran : Jumlah ldata yang diarsipkan	500	500	Arsip	
						Hasil : Terdokumentasikanya Arsip OPD	100	100	%	
4.03.4.03.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	527.562.900	471.771.039	55.791.861	89,42	% Sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi sebesar 86 %	86 %			Program terlaksana dengan baik untuk menunjang seluruh kegiatan, rekomendasi kedepan ada pagu anggaran kegiatan yang memungkinkan terutama untuk pemeliharaan kendaraan bermotor dapat difisiensi dalam penganggarannya.
4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	19.444.000	556.000	97,22	Masukan : Jumlah Dana	20.000.000	19.444.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah peralatan yang dibutuhkan	5	5	Jenis	
						Hasil : Tersedianya printer dan monitor	100	100	%	
4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	50.000.000	43.750.000	6.250.000	87,50	Masukan : Jumlah Dana	50.000.000	43.750.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah peralatan yang dibutuhkan	2	2	Set	
						Hasil : Tercukupinya Mebeleur Kantor	100	100	%	
4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	170.000.000	165.865.039	4.134.961	97,57	Masukan : Jumlah Dana	170.000.000	165.865.039	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	40	40	Paket	
						Hasil : Terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor Bappeda	100	100	%	
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	233.122.500	197.568.750	35.553.750	84,75	Masukan : Jumlah Dana	233.122.500	197.568.750	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah kendaraan	18	18	Unit	

						dinas/operasional yang dipelihara				
						Hasil : Terpenuhinya BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional	100	100	%	
4.03.4.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	21.440.400	19.374.250	2.066.150	90,36	Masukan : Jumlah Dana	21.440.400	19.374.250	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	121	98	Jenis	
						Hasil : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100	100	%	
4.03.4.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	33.000.000	25.769.000	7.231.000	78,09	Masukan : Jumlah Dana	33.000.000	25.769.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	150	47	buah	
						Hasil : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	100	%	
4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97.100.000	71.748.800	25.351.200	73,89	% Dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu 100%	100%	100%	100%	Target capaian program tercapai dengan seluruh laporan kegiatan
4.03.4.03.01.05.04	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	97.100.000	1.748.800	25.351.200	73,89	Masukan : Jumlah Dana	97.100.000	71.748.800	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah Aparatur perencana dan peneliti yang terdemotivasi	46	46	orang	
						Hasil : Terlaksananya diklat perencana dan peneliti sesuai kualifikasi	100	100	%	
4.03.4.03.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	27.851.000	2.149.000	92,84	Rata-rata nilai SKP ASN dengan kategori baik	Baik	Baik	100 %	Target capaian program tercapai (hasil nilai rata-rata antara 76-90 dari 46 ASN)
4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000	23.251.000	1.749.000	93,00	Masukan : Jumlah Dana	25.000.000	23.251.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah Laporan yang disusun	4	4	Laporan	
						Hasil : Terwujudnya akuntabilitas kinerja	100	100	%	
4.03.4.03.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.500.000	2.410.000	90.000	96,40	Masukan : Jumlah Dana	,	2.410.000,00	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah Laporan keuangan yang disusun	2	2	Laporan	
						Hasil : Terwujudnya penyusunan laporan keuangan semesteran	100	100	%	
4.03.4.03.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000	2.190.000	310.000	87,60	Masukan : Jumlah Dana	2.500.000	2.190.000	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1	1	Laporan	
						Hasil : Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD	100	100	%	
4.03.4.03.01.15	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.411.655.505	1.335.637.545	76.017.960	94,61	% Kesesuaian usulan kegiatan pembangunan dalam RKPD terhadap prioritas tahunan daerah sebesar 100 %	100			
						% data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas sebesar 90 %	90			
						% hasil rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti 80 %	80			
4.03.4.03.01.15.11	Pengembangan Planning Center (Pusat database dan informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik)	35.620.000	34.220.000	1.400.000	96,07	Masukan : Jumlah Dana	35.620.000	34.220.000	Rupiah	
						Keluaran : Updating data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	30	30	Urusan	
						Hasil : Tersedianya Data dan Meeting Point Perencanaan Pembangunan	100	100	%	
4.03.4.03.01.	Penyusunan LKPJ Bupati Nganjuk		21.496.000		95,87	Masukan : Jumlah Dana	126.730.000	121.496.000	Rupiah	

15.01	Tahun 2019	126.730.000		5.234.000		Keluaran : Tersusunnya buku LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran	120	120	buku	
						Hasil : Pelaksanaan pembangunan selama 1 tahun masa jabatan Bupati dapat dipertanggung jawabkan melalui pengukuran terhadap indikator kinerja dari masing-masing sasaran dalam RPJMD	100	100	%	
4.03.4.03.01.15.05	Pengelolaan SIPD	36.069.000	30.479.000	5.590.000	84,50	Masukan : Jumlah Dana	36.069.000	30.479.000	Rupiah	
						Keluaran : Tersusunnya laporan tribulan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kab.nganjuk	1	1	laporan	
						Hasil : Dapat diketahuinya perkembangan permasalahan serta konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan laporan OPD	100	100	%	
4.03.4.03.01.15.06	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah	410.793.505	367.869.545	42.923.960	89,55	Masukan : Jumlah Dana	410.793.505	367.869.545	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya musrenbang kabupaten dan monitoring musrenbang kecamatan, pengiriman peserta untuk FKD RKPD Provinsi tahun 2021,musrenbang tingkat bakorwil,provinsi dan nasional tersusunnya RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020.	30	30	Urusan kewenangan	
						Hasil : Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, demokratis, transparan dan akuntabel terwujudnya target kinerja pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2021	100	100	%	
4.03.4.03.01.15.07	Penyusunan KUA dan PPAS	729.155.000	722.109.000	7.046.000	99,03	Masukan : Jumlah Dana	729.155.000	722.109.000	Rupiah	
						Keluaran : Tersusunnya rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2020, KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2020, rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021, KUA dan PPAS Tahun 2021				
						Hasil : Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, demokratis, transparan dan akuntabel terwujudnya target kinerja pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2021	100	100	%	
4.03.4.03.01.	Pengendalian dan Evaluasi		30.511.000		76,30	Masukan : Jumlah Dana	39.988.000	30.511.000	Rupiah	

15.08	Perencanaan Pembangunan Daerah	39.988.000		9.477.000		Keluaran : Tersusnya laporan Tribunal pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kab. Nganjuk	80	80	buku	
						Hasil : Dapat diketahuinya perkembangan permasalahan serta konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan laporan OPD	32	32	OPD	
4.03.4.03.01.15.09	Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan	33.300.000	28.953.000	4.347.000	86,95	Masukan : Jumlah Dana	33.300.000	28.953.000	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya koordinasi dalam perencanaan perekonomian dan pembangunan Kab Nganjuk	100	100	%	
						Hasil : Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan perekonomian dan pembangunan infrastruktur Kab. Nganjuk	100	100	%	
4.03.4.03.01.16	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	28.086.000	16.140.800	1.945.200	57,47	% Outcome program Bidang pemerintahan dengan tingkatan capaian ≥ 80 %	100%			Target capaian program tercapai dengan dilaksanakannya penyusunan laporan dan asistensi kepada bidang hadapan
4.03.4.03.01.16.01	Pagu Indkatif Kewilayahan	4.979.000	4.652.300	326.700	93,44	Masukan : Jumlah Dana	4.979.000	4.652.300	Rupiah	
						Keluaran : Tersusnya Peraturan Bupati dan usulan prioritas dari Kecamatan	1	1	paket	
						Hasil : Perub PIK Kab. Nganjuk	100	100	%	
4.03.4.03.01.16.02	Evaluasi Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	23.107.000	11.488.500	11.618.500	49,72	Masukan : Jumlah Dana	23.107.000	11.488.500	Rupiah	Disesuaikan dengan kebutuhan, karena pelaksanaan pada saat pandemi COVID-19
						Keluaran : Terlaksananya koordinaasi pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, DAK dan BK dengan instansi vertikal/SKPD yang berkedudukan di Kab. Nganjuk	100	100	%	
						Hasil : Meningkatnya Konsistensi antara perencana dan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan	100	100	%	
4.03.4.03.01.17	Program Perencanaan Bidang Sosial	342.582.200	266.939.700	75.642.500	77,92	% Outcome program Bidang Sosial dengan tingkatan capaian ≥ 80 %	100%	100%	100%	Target capaian program tercapai dengan dilaksanakannya penyusunan laporan dan asistensi kepada bidang hadapan
4.03.4.03.01.17.02	Koordinasi dan fasilitasi program kabupaten Sehat	81.305.700	75.807.600	5.498.100	93,24	Masukan : Jumlah Dana	81.305.700	75.807.600	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Kab. Sehat melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat	100	100	%	
						Hasil : Terciptanya kondisi yang bersih, aman, nyaman dan sehat di 20 Kecamatan	100	100	%	
4.03.4.03.01.	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan		14.248.200		74,66	Masukan : Jumlah Dana	19.083.000	14.248.200	Rupiah	

17.05	bina lingkungan / tanggungjawab sosial bagi perusahaan (corporate social responsibility / CSR)	19.083.000		4.834.800		Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan bina lingkungan/tanggungjawab sosial perusahaan	1	1	Dokumen	
						Hasil : Dokumen koordinasi dan fasilitasi kegiatan bina lingkungan/tanggungjawab sosial	100	100	%	
4.03.4.03.01.17.06	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	114.568.000	78.092.900	36.475.100	68,16	Masukan : Jumlah Dana	114.568.000	78.092.900	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah, terwujudnya sistem informasi penanggulangan kemiskinan	100	100	%	
						Hasil : Terwujudnya sinergi penanggulangan kemiskinan	100	100	%	
4.03.4.03.01.17.10	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	127.625.500	98.791.000	28.834.500	77,41	Masukan : Jumlah Dana	127.625.500	98.791.000		
						Keluaran : Jumlah urusan yang diampu	100	100	%	
						Hasil : Terlaksananya fasilitasi urusan yang diampu	100	100	%	
4.03.4.03.01.18	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	186.588.200	138.907.450	47.680.750	74,45	% Outcome program Bidang ekonomi dengan tingkatan capaian \geq 80 %	100 %	100%	100%	Target capaian program tercapai dengan dilaksanakannya penyusunan laporan dan asistensi kepada bidang hadapan
4.03.4.03.01.18.01	Pendamping Program Anti Kemiskinan (APP)	88.336.500	68.307.050	20.029.450	77,33	Masukan : Jumlah Dana	88.336.500	68.307.050	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya bantuan saprodi/bibit bidang pertanian bagi kelompok masyarakat miskin (pokmaskin)	100	100	%	
						Hasil : Pengembangan kepada kelompok masyarakat (Pokmas) melalui usaha produktif	100	100	%	
4.03.4.03.01.18.05	Koordinasi Perencanaan Kegiatan Perekonomian	62.994.900	46.748.500	16.246.400	74,21	Masukan : Jumlah Dana	62.994.900	46.748.500	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya koordinasi kegiatan perekonomian	100	100	%	
						Hasil : Pengembangan perekonomian kabupaten Nganjuk	16	16	Urusan	
4.03.4.03.01.18.06	Pendampingan Kawasan Agropolitan	35.256.800	23.851.900	11.404.900	67,65	Masukan : Jumlah Dana	35.256.800	23.851.900	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu	8	8	Kecamatan	
						Hasil : Meningkatnya produksi, produktifitas dan informasi pasar komoditas unggulan kawasan Agropolitan dan selingkar wilis	8	8	Kecamatan	
4.03.4.03.01.19	Program Peningkatan Bidang Infrastruktur	629.669.900	545.444.100	84.225.800	86,62	% Outcome program Bidang Infrastruktur dengan tingkatan \geq 80 %	100 %	100 %	100 %	Target capaian program tercapai dengan dilaksanakannya penyusunan laporan dan asistensi kepada bidang hadapan
4.03.4.03.01.	Perencanaan dan evaluasi		46.875.100		65,47	Masukan : Jumlah Dana	71.600.000	46.875.100	Rupiah	

19.06	pembangunan bidang perumahan , kawasan permukiman dan pertanahan	71.600.000		24.724.900		Keluaran : Biaya Operasional Pengelolaan Air minum dan sanitasi	100	100	%	
						Hasil : Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang perumahan , kawasan permukiman dan pertanahan	100	100	%	
4.03.4.03.01. 19.10	Perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum	558.069.900	498.569.000	59.500.900	89,34	Masukan : Jumlah Dana	558.069.900	498.569.000	Rupiah	
						Keluaran : Biaya Operasional Pengelolaan TMMD tahun 2020	45	45	Orang	
						Hasil : Terwujudnya Perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum	100	100	%	
4.03.4.03.01. 20	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	433.157.150	350.991.543	82.165.607	81,03	% kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan RTRW sebesar 100 %	100 %	100 %	100 %	Target capaian program tercapai dengan dilaksanakannya penyusunan laporan dan asistensi kepada bidang hadapan
4.03.4.03.01. 20.01	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan)	183.157.150	131.872.300	51.284.850	72,00	Masukan : Jumlah Dana	183.157.150	131.872.300	Rupiah	
						Keluaran : Jumlah Koordonasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan	24	24	Kali	
						Hasil : Terlaksananya Koordinasi dan Fasiliatsi	100	100	%	
4.03.4.03.01. 20.02	Perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang tata ruang	250.000.000	219.119.243	30.880.757	87,65	Masukan : Jumlah Dana	250.000.000	219.119.243	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang tata ruang	100	100	%	
						Hasil : Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang tata ruang	100	100	%	
4.03.4.03.01. 15	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan Daerah	7.892.727.000	3.271.424.891	4.621.302.109	41,45	% pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100%	100%	50 %	50 %	Permasalahan : Tidak tercapainya target kinerja program karena ada 2 dari 4 rencana kegiatan kajian kelitbangan yang terealisasi. Pemecahan masalah : Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen hasil kajian yang teralisasi untuk bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah
4.03.4.03.01. 15.01	Penyusunan Perencanaan Lanjutan Studi Kelayakan Bendungan Margopatut Kec. Sawahan (DED)	3.371.654.100	21.838.000	3.349.816.100	0,65	Masukan : Jumlah Dana	3.371.654.100	21.838.000	Rupiah	Tidak terserapnya anggaran Karena adanya permasalahan pada proses pengadaan yaitu dengan matinyanya SKA tenaga ahli, sehingga PPKom memutuskan untuk menawarkan pembaharuan kontrak kepada rekanan, dengan jangka waktu 100 hari. Namun rekanan tidak sanggup melaksanakan sehingga kontrak dibatalkan
						Keluaran : Dokumen Perencanaan DED	1	0	Dokumen	
						Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lanjutan Studi Kelayakan Bendungan Margopatut (DED)	100	100	%	
4.03.4.03.01. 15.19	Fasilitasi Pembangunan Bendungan Semantok dan Bendungan Margopatut Kabupaten Nganjuk	2.812.585.000	2.190.356.580	622.228.420	77,88	Masukan : Jumlah Dana	2.812.585.000	2.190.356.580	Rupiah	
						Keluaran : Terlaksananya proses perijinan pembangunan Bendungan di	1	1	Dokumen	

						wilayah Perhutani dan pengadaan sarana pendukung percepatan pembangunan proyek strategis nasional					
						Hasil : Tersusunya dokumen perijinan rencana pembangunan Bendungan Semantok dan Margopatut	100	100	%		
4.03.4.03.01.15.21	Fasilitasi Perijinan Pembangunan di Lahan Kawasan Hutan	566.363.000	453.589.000	112.774.000	80,09	Masukan : Jumlah Dana	566.363.000	453.589.000	Rupiah		
						Keluaran : Terlaksananya proses perijinan yang melalui kawasan Perum Perhutani unit II Jatim	1	1	Dokumen		
						Hasil : Dokumen Perijinan pemanfaatan wilayah hutan untuk pembangunan wilayah sekitar hutan	100	100	%		
4.03.4.03.01.15.30	Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Nganjuk	472.547.300	259.247.962	213.299.338	54,86	Masukan : Jumlah Dana	472.547.300	259.247.962	Rupiah		
						Keluaran : Jumlah Fasilitasi Yang Dilaksanakan	12	12	bulan		
						Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Dewan Riset Daerah	100	100	%		
4.03.4.03.01.15.31	Penelitian Peningkatan Pendapatan Petani dengan penerapan sistem pertanian terpadu (lanjutan)	150.000.000	146.645.900	3.354.100	97,76	Masukan : Jumlah Dana	150.000.000	146.645.900	Rupiah		
						Keluaran : Terlaksananya penelitian peningkatan pendapatan petani dengan penerapan sistem pertanian terpadu	1	1	Dokumen		
						Hasil : Terwujudnya penelitian peningkatan pendapatan petani dengan penerapan sistem pertanian terpadu	100	100	%		
4.03.4.03.01.15.52	Studi Kelayakan Pembangunan tempat pengolahan limbah B3 di kabupaten Nganjuk	300.000.000	2.550.000	297.450.000	0,85	Masukan : Jumlah Dana	300.000.000	2.550.000	Rupiah	Tidak terserapnya naggaran karena dari hasil evaluasi PAPBD Prov Jatim limbah B3 menjadi kewenangan Provinsi	
						Keluaran : Jumlah Dokumen Studi yang Disusun	1	0	dokumen		
						Hasil : Terwujudnya pengolahan Limbah B3 yang memenuhi standar kelayakan	100	100	%		
4.03.4.03.01.15.67	Studi Penutupan lahan hutan di Kabupaten Nganjuk	200.000.000	183.176.549	16.823.451	91,59	Masukan : Jumlah Dana	200.000.000	183.176.549	Rupiah		
						Keluaran : Jumlah Dokumen Studi yang Disusun	1	1	dokumen		
						Hasil : Tersusunya Dokumen Studi Penutupan Lahan Hutan di Kabupaten Nganjuk	100	100	%		
4.03.4.03.01.15.68	Koordinasi dengan Lembaga LITBANG dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan	19.577.600	14.020.900	5.556.700	71,62	Masukan : Jumlah Dana	19.577.600	14.020.900	Rupiah		
						Keluaran : Teridentifikasinya hasil hasil Litbang lembaga pemerintahan maupun swasta yang sesuai dengan potensi yg dimiliki oleh Kab. Nganjuk	1	1	Paket		
						Hasil : Rekomendasi Kerjasama	100	100	%		
		12.050.119.855	6.883.728.199	5.166.391.656	57,13						

BAB IV

Penutup

Pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2020 secara umum telah menyelesaikan program dan kegiatan yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sasaran I **“Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis”** sebesar **92,59%**. Sasaran II **“Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan”** sebesar **67%**.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan kemampuan organisasi yang ada. Penurunan kinerja sasaran yang dicapai tetap harus selalu dievaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi akan berbeda. Untuk itu sikap taktis dan responsive harus terus menerus dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga harus bisa dimanfaatkan guna memacu kinerja instansi.

Kami berharap Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kabupaten Nganjuk, dan semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Matriks Renstra
- B. IKU
- C. Perjanjian Kinerja

**RINGKASAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
BAPPEDA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Keterangan
Meningkatnya Konsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran Dalam Perencanaan Pembangunan	% kesesuaian muatan antara RKPD dengan RPJMD	100 %	95,85%	95,85%	
	% kesesuaian muatan antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	100%	100%	
	% kesesuaian muatan KUA-PPA dengan RKPD	100 %	99,98%	99,98%	
	% sasaran kinerja RPJMD yang mencapai target	100 %	95%	95%	
Capaian Sasaran I			97,71%	100%	
Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan	% rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	100 %	90%	90%	
Capaian Sasaran III			90%	90%	

Nganjuk, Pebruari 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN NGANJUK

Drs. ADAM MUHARTO, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19730511 199311 1 002